



ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU SUMATERA

Muhamad Refkhi Al Aqilah^{1*)}, Masruri Muchtar²⁾; Pardomuan Robinson Sihombing³⁾

^{1*)} muhamadrefkhi@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ masruri.m@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ robinson@bps.go.id, Badan Pusat Statistik

*penulis korespondensi

Abstract

Income inequality is a global issue that affects numerous countries, including Indonesia. Countries recognize the necessity to address this challenge to safeguard the well-being of their populations. Hence, analyzing the factors contributing to high income inequality is crucial for designing effective and targeted policies. This study aims to analyze the factors influencing income inequality on Sumatra Island during the period 2012-2022. The independent variables include population, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Gender Empowerment Index (IDG), the percentage of poor population, and Provincial Minimum Wage (UMP). The analytical method applied involves panel data regression using the random effects model (REM). The results indicate that GRDP and the percentage of poor population exert a significant positive influence on income inequality. In contrast, population and UMP have a significant negative effect on income inequality, whereas IDG shows no significant effect. The implication is that the government needs to formulate policies aimed at reducing the number of poor population, appropriately setting the UMP and improving the quality and equitable distribution of population growth to mitigate the level of income inequality.

Keywords: Income Inequality, Minimum Wage, Population, Poor

Abstrak

Ketimpangan pendapatan merupakan isu global yang memengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia. Negara-negara tersebut merasa perlu mengatasi tantangan ini untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, analisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan yang tinggi menjadi krusial dalam merancang kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera pada periode 2012-2022. Variabel independen yang digunakan melibatkan jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), persentase penduduk miskin, dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Metode analisis yang diterapkan adalah regresi data panel dengan menggunakan model random effect (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan persentase penduduk miskin memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sementara itu, jumlah penduduk dan UMP memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sementara IDG tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Implikasinya, pemerintah perlu merancang kebijakan yang dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, menetapkan UMP secara tepat guna dan peningkatan kualitas serta pemerataan pertumbuhan penduduk mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan.

Kata Kunci: Jumlah penduduk, Kemiskinan, Ketimpangan pendapatan, Upah minimum

PENDAHULUAN

Indonesia diinginkan untuk mencapai status negara maju dalam aspek perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya, dan harapannya adalah terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Salah satu tantangan yang masih dihadapi oleh banyak negara dalam mencapai kesejahteraan adalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan adalah distribusi yang tidak proporsional dari total pendapatan nasional di antara rumah tangga atau masyarakat (Todaro & Smith, 2020). Maka kondisi ini menjadi fokus pemerintah untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengendalikan tingkat ketimpangan pendapatan di tingkat yang rendah. Agar dapat mengatasi tingkat ketimpangan pendapatan, perlu dilakukan identifikasi yang akurat terhadap faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di suatu negara.

Salah satu metode pengukuran tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah adalah Koefisien Gini, yang umumnya disebut sebagai *gini ratio*. *Gini ratio* merupakan indikator numerik yang mengukur sejauh mana ketimpangan pendapatan terdistribusi, dengan rentang



nilai antara 0 (paling merata) hingga 1 (paling tidak merata) (Todaro & Smith, 2020). Menurut Suryamin (2016), *gini ratio* dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ketimpangan rendah (0 - 0,3), ketimpangan menengah (0,3 - 0,5), dan ketimpangan tinggi (di atas 0,5) (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016). Berdasarkan data dari World Bank (2022), Indonesia mencatat *gini ratio* sebesar 0,379 pada tahun 2022, menempatkannya dalam kategori ketimpangan menengah.

Namun jika dilihat berdasarkan *gini ratio* per provinsi, angkanya sangat bervariasi mulai dari 0,2 hingga 0,4. Berikut ditampilkan nilai rata-rata dari *gini ratio* 33 provinsi di Indonesia periode 2011 – 2022:

Tabel 1. Rata-Rata Nilai *Gini Ratio* Berdasarkan Provinsi Periode 2011 – 2022

No	Provinsi	Nilai Rata-Rata <i>Gini ratio</i>	No	Provinsi	Nilai Rata-Rata <i>Gini ratio</i>
1	Aceh	0,326	18	Nusa Tenggara Barat	0,373
2	Sumatera Utara	0,319	19	Nusa Tenggara Timur	0,350
3	Sumatera Barat	0,318	20	Kalimantan Barat	0,344
4	Riau	0,347	21	Kalimantan Tengah	0,333
5	Jambi	0,335	22	Kalimantan Selatan	0,341
6	Sumatera Selatan	0,359	23	Kalimantan Timur	0,337
7	Bengkulu	0,348	24	Sulawesi Utara	0,387
8	Lampung	0,334	25	Sulawesi Tengah	0,348
9	Kep. Bangka Belitung	0,280	26	Sulawesi Selatan	0,405
10	Kepulauan Riau	0,359	27	Sulawesi Tenggara	0,391
11	DKI Jakarta	0,409	28	Gorontalo	0,416
12	Jawa Barat	0,404	29	Sulawesi Barat	0,359
13	Jawa Tengah	0,368	30	Maluku	0,334
14	DI Yogyakarta	0,433	31	Maluku Utara	0,312
15	Jawa Timur	0,378	32	Papua Barat	0,394
16	Banten	0,381	33	Papua	0,408
17	Bali	0,388			

Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Data *Gini Ratio* Oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023

Dari data tabel yang tertera, terlihat bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan rata-rata *gini ratio* paling rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, bahkan lebih rendah dari nilai *gini ratio* nasional. Sebaliknya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan rata-rata *gini ratio* yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Perlu dicatat bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki perbedaan yang cukup mencolok dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera, meskipun mereka berada di wilayah dengan budaya yang hampir serupa. Perbedaan signifikan dalam nilai *gini ratio* antar provinsi di Indonesia menjadi topik perdebatan mengenai faktor apa yang dapat memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Beberapa penelitian telah dilaksanakan untuk mengeksplorasi faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Menurut Lestari (2016), jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sementara inflasi memiliki dampak negatif dan signifikan. Temuan serupa juga disajikan oleh Feraliani et al. (2021), yang menemukan bahwa jumlah penduduk memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Di sisi lain, penelitian oleh Syahri & Gustiara (2020) menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB)



memberikan dampak positif, meskipun tidak signifikan, dan tingkat kemiskinan memberikan dampak negatif dan signifikan. Nuriani (2019) menemukan bahwa variabel penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan dampak negatif yang tidak signifikan, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan dampak negatif dan signifikan, dan Upah Minimum Kota (UMK) memberikan dampak positif yang tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian oleh Anshari et al. (2019) menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan riset Bhagaskara (2023), yang menunjukkan bahwa upah minimum dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

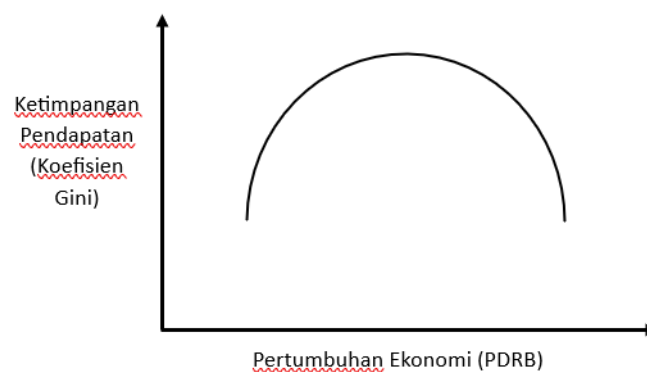
Namun penelitian yang mengangkat isu ini bila dikaitkan dengan sejumlah provinsi di Indonesia khususnya Pulau Sumatera masih terbatas padahal merupakan pulau kedua dengan kontribusi ekonomi tertinggi di Indonesia (BAPPENAS, 2021). Pada penelitian ini juga ditambahkan variabel lain yakni IDG yang belum pernah dilakukan penelitian mengenai pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan. Dari penjelasan sebelumnya, penulis bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi, dan menganalisis faktor yang memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan faktor-faktor yang secara signifikan membedakan tingkat ketimpangan pendapatan antar provinsi, terutama di Pulau Sumatera.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Ketimpangan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang, sering menghadapi masalah, dimana pertumbuhan tersebut cenderung dinikmati oleh sebagian kecil orang. Dampaknya adalah terjadinya ketimpangan yang semakin memburuk, dimana hanya segelintir individu yang mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut (Todaro & Smith, 2011). Ketimpangan pendapatan ini umumnya diukur dengan menggunakan berbagai metode, dengan *gini ratio* menjadi salah satu yang paling umum digunakan.

Gambar 1. Kurva “U-Terbalik” Kuznets



Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Referensi Todaro & Smith (2011)

Menurut Simon Kuznets, berdasarkan kurva “U-Terbalik” yang dijelaskan di atas, dapat diamati bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, tingkat ketimpangan cenderung meningkat atau memburuk. Namun, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan akan mengalami penurunan atau semakin berkurang (Todaro & Smith, 2020).

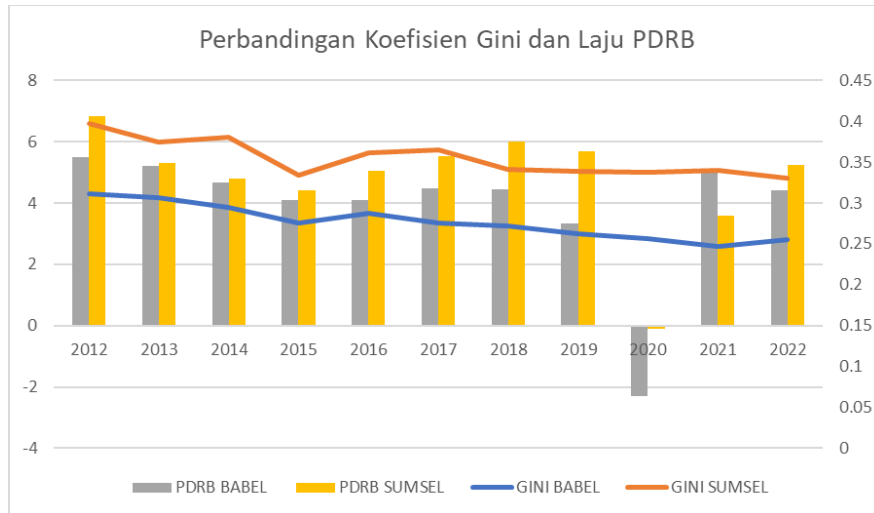
Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam Adisasmita (2013), pertumbuhan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi agar dapat menambah output yang dihasilkan, pertumbuhan ini dinilai melalui penggunaan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Nuriani, 2019). Pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat



menciptakan ekonomi yang maju dan masyarakat yang sejahtera. Berikut ditampilkan perbandingan nilai *gini ratio* dan pertumbuhan ekonomi antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2012-2022:

Gambar 2. Perbandingan *Gini Ratio* dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Babel dan Provinsi Sumsel 2012-2022



Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Data *Gini Ratio* dan Laju PDRB dari BPS Periode 2012-2022

Dari grafik, terlihat bahwa PDRB di kedua provinsi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi positif, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi. Selama periode 2012 hingga 2022, keduanya berhasil menurunkan tingkat *gini ratio*, menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Sumatera Selatan. Temuan ini berbeda dengan riset yang dilakukan oleh Lestari (2016), yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki kontribusi positif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi tingkat disparitas pendapatan di wilayah tersebut.

Indeks Pemberdayaan Gender

Berdasarkan *website* BPS, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mencerminkan kemampuan perempuan untuk berperan aktif dalam sektor ekonomi dan politik. Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi tingkat ketimpangan, diperlukan kebijakan serta komitmen bersama dari pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan peran mereka dalam proses pembangunan ekonomi (Todaro & Smith, 2011). Hasil ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Hartono et al. (2023), yang menyatakan bahwa IDG memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Penduduk

Berdasarkan *website* BPS, penduduk merujuk pada semua individu yang tinggal di wilayah geografis Republik Indonesia selama minimal 6 bulan atau lebih, atau mereka yang tinggal kurang dari 6 bulan tetapi dengan niat untuk menetap. Pertumbuhan jumlah penduduk seharusnya menjadi keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah negara untuk meningkatkan perekonomiannya. Hal ini dapat dibandingkan dengan konsep fungsi produksi yang diperkenalkan oleh Cobb-Douglas, di mana output dipengaruhi oleh kombinasi modal dan tenaga kerja (Mankiw, 2016). Bertambahnya jumlah tenaga kerja akan berdampak pada peningkatan output, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat.



Dalam buku "Ekonomi Pembangunan" yang ditulis oleh Arsyad (2015), dijelaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menjadi penyebab ketimpangan pendapatan, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas masyarakat. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Lestari (2016) dan Ferialiani et al. (2021), menyatakan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara jumlah penduduk dengan ketimpangan pendapatan, temuan ini berlawanan dengan penelitian Nuriani (2019) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Kemiskinan

Dari *website* BPS, tingkat kemiskinan diukur dengan menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar. Penduduk dianggap miskin jika rata-rata pengeluaran perkapita perbulan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini dapat bervariasi antar negara karena setiap negara memiliki standar kebutuhan dasar dengan tingkat harga yang berbeda, sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh (Todaro & Smith, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rini et al. (2022), ditemukan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara persentase penduduk miskin dengan gini ratio di berbagai provinsi di Indonesia. Sebaliknya, penelitian oleh Syahri & Gustiara (2020) yang bertujuan menganalisis efek pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara menghasilkan temuan yang berbeda, di mana tingkat kemiskinan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap *gini ratio*.

Tingkat Upah

Menurut prinsip ekonomi neoklasik, keberadaan regulasi upah minimum dapat memperbesar ketimpangan pendapatan. Kehadiran regulasi ini menciptakan ambang batas upah minimum, yang pada gilirannya meningkatkan nilai upah pekerja. Peningkatan ini dapat mengacaukan keseimbangan di kurva pasar tenaga kerja, mengakibatkan perusahaan mengurangi permintaan tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan (Sungkar et al., 2015).

Namun diketahui sejumlah ekonom juga berpendapat bahwa upah minimum dapat mengurangi ketimpangan pendapatan karena dapat meningkatkan standar nilai upah dan mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata (Sungkar et al., 2015). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Nuriani (2019), temuannya menyatakan bahwa regulasi Upah Minimum memberikan dampak positif, meskipun tidak signifikan, terhadap ketidaksetaraan pendapatan.

Hipotesis

Berdasarkan teori serta penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan

H₂: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan

H₃: IDG berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan

H₄: Kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan

H₅: UMP berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan

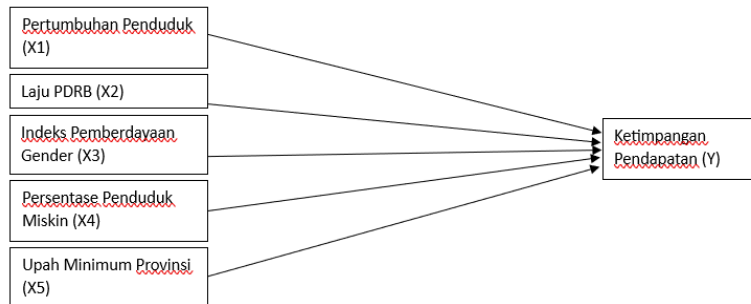
METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk melakukan penelitian pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Studi ini menggunakan ketimpangan pendapatan yang diterjemahkan kedalam nilai *gini ratio* sebagai variabel dependen sedangkan untuk variabel independennya adalah pertumbuhan penduduk, indeks



peremberdayaan gender, pertumbuhan ekonomi yang diwakilkan oleh laju pertumbuhan PDRB, persentase penduduk miskin dan UMP mulai dari tahun 2012 hingga 2022. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (ketimpangan pendapatan) dengan rancangan penelitian sebagai berikut:

Gambar 3 Kerangka Konseptual



Dalam penelitian ini, penerapan metode regresi linear berganda dilakukan dengan memanfaatkan data panel. Analisis data menggunakan metode regresi linear berganda pada data panel dilaksanakan dengan menggunakan bantuan aplikasi STATA 18. Model regresi data panel umumnya mencakup tiga pendekatan utama, yakni *Fixed Effect Model* (FEM), *Common Effect Model* (CEM)/*Pooled Least Square* (PLS), dan *Random Effect Model* (REM). Untuk menentukan model terbaik di antara ketiganya, dilakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Selain itu, dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik, termasuk uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya, dilakukan pengujian *goodness of fit* melalui uji F dan uji t, serta pengamatan pada koefisien determinasi (R²). Persamaan model regresi linear berganda dengan data panel untuk penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 \ln X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + \beta_5 \ln X5_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

- Y_{it} = Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)
- X1_{it} = Jumlah Penduduk
- X2_{it} = Indeks Pemberdayaan Gender
- X3_{it} = PDRB ADHK
- X4_{it} = Persentase Penduduk Miskin
- X5_{it} = Upah Minimum Provinsi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif menurut Sugiyono (2004) yaitu merupakan sebuah statistik yang digunakan untuk melakukan analisa data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Hasil pengujian statistik deskriptif terhadap seluruh variabel ditunjukkan oleh Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
GINI (RASIO)	110	0,247	0,437	0,332	0,030
PENDUDUK (JIWA)	110	128.700	15.115.200	5.662.044	3.760.948
PDRB (MILIAR)	110	32.363,040	573.528,770	211.768,100	151.907,400
IDG (RASIO)	110	51,69	75,73	65,82	5,57
KEMISKINAN (PERSEN)	110	4,50	18,58	10,17	4,07
UMP	110	930.000,0	3.264.884,0	2.111.086,0	621.456,2



Sumber : Diolah Penulis Menggunakan STATA 18

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rata-rata gini ratio 10 Provinsi di Pulau Sumatera adalah 0,332. *Gini ratio* tertinggi pada Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,437 dan terendah pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021. Rata-rata jumlah penduduk di Pulau Sumatera adalah sebesar 5.662.004 jiwa dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 dan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012. Rata-rata IDG di Pulau Sumatera adalah 65,82 dengan nilai tertinggi pada Provinsi Riau tahun 2018 dan nilai terendah pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016. Rata-rata PDRB ADHK untuk Pulau Sumatera adalah sebesar 211.768,10 miliar rupiah dengan nilai tertinggi dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 dan nilai terendah oleh Provinsi Bengkulu tahun 2012. Sedangkan untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki rata-rata 2.111.086,00 rupiah dengan nilai tertinggi dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 dan nilai terendah oleh Provinsi Bengkulu tahun 2012. Kemudian untuk persentase penduduk miskin, nilai rata-ratanya adalah 10,17 persen dengan nilai tertinggi pada Provinsi Aceh tahun 2012 dan nilai terendah pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022.

Uji Spesifikasi Model

Dalam melakukan analisis regresi pada tipe data panel, langkah awalnya melibatkan penentuan model regresi terbaik di antara *Fixed Effect Model* (FEM), *Common Effect Model* (CEM)/*Pooled Least Square* (PLS), *Random Effect Model* (REM). Proses penentuan model ini melibatkan uji chow, uji lagrange multiplier dan uji hausman. Hasil pengujian ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Uji Pemilihan Model

Nama Uji	P-Value	Interpretasi
F-Test (Uji Chow)	0.0000	FEM lebih baik daripada CEM
Uji Lagrange Multiplier Test	0.0000	REM lebih baik daripada CEM
Uji Hausman	0.4074	REM lebih baik daripada FEM

Sumber : Diolah Penulis Menggunakan STATA 18

Berdasarkan hasil dari ketiga uji yang dilakukan, disimpulkan bahwa *Random Effect Model* (REM) menjadi model terbaik dari ketiga model yang telah diuji. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, *Random Effect Model* (REM) akan digunakan untuk melakukan analisis regresi pada data panel.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang dilakukan pengujian memiliki normalitas residual, tidak mengandung multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Model regresi dalam penelitian dapat dikatakan model yang baik jika memenuhi asumsi klasik diatas. Hasil uji asumsi klasik adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Nama Uji	P-Value	VIF	Interpretasi
Uji Normalitas	0.0000		Data tidak terdistribusi normal
Uji Heteroskedastis	0.0058		Data tidak memenuhi uji heteroskedastisitas
Uji Multikolinearitas		4.12	Data memenuhi uji multikolinearitas
Uji Autokorelasi	0.8945		Data memenuhi uji autokorelasi

Sumber : Diolah Penulis Menggunakan STATA 18

Berdasarkan hasil pengujian diatas, data yang digunakan tidak memenuhi uji normalitas. Namun menurut Gujarati (2003) dalam Sekar Palupi et al. (2023) jika jumlah sampel penelitian yang dipilih memiliki jumlah yang banyak ($n > 30$), maka asumsi normalitas dapat diabaikan. Pada penelitian ini menggunakan sampel yang berjumlah 110 ($n > 30$) dan sesuai dengan penjelasan oleh Gujarati maka data dapat dikatakan terdistribusi normal (sampel



besar). Kemudian model juga tidak lolos uji heteroskastisitas, namun menurut Handarini (2014) dalam Awaludin et al. (2023) jika model yang terpilih adalah REM maka tidak perlu dilakukan uji heteroskedastisitas. Hal ini disebabkan karena pada REM telah menggunakan *Generallized Least Square* (GLS). Sedangkan untuk uji multikolinearitas dan autokorelasi, model sudah memenuhi asumsi.

Regresi Data Panel *Random Effect Model*

Setelah melakukan pengujian untuk menentukan model regresi terbaik yang akan digunakan dan terpilih *Random Effect Model* (REM), maka selanjutnya dilakukan regresi dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Regresi *Random Effect Model*

R-Square		0,7320		
Prob > F		0,0000		
Gini	Coef	Std. Err	z	P > z
lnpenduduk	-0,0497865	0,014705	-3,39	0,001
lnpdrb	0,0512482	0,0131354	3,90	0,000
idg	0,0003934	0,0004764	0,83	0,409
miskin	0,0044008	0,0013331	3,30	0,001
lnump	-0,0580646	0,0052459	-11,07	0,000
cons	1,252347	0,1241493	10,09	0,000

Sumber : Diolah Penulis Menggunakan STATA 18

Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai probabilitas F adalah 0,0000 ($F < 0,05$), menunjukkan bahwa secara keseluruhan, variabel independen memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen. Didapati juga nilai R-Square atas model regresi pada penelitian ini adalah 0,7320. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen (*gini ratio*) mampu dijelaskan oleh variabel independen (penduduk, PDRB ADHK, IDG, kemiskinan dan UMP) sebesar 73,20%, sementara sisanya 26,80% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Selanjutnya, hasil uji statistik t untuk setiap variabel independen dinyatakan melalui nilai probabilitas yang tercantum dalam tabel 5. Berdasarkan analisis regresi menggunakan menggunakan REM, variabel independen yang menunjukkan nilai probabilitas kurang dari 0,05 ($\alpha < 0,05$) adalah variabel lnpenduduk (pertumbuhan penduduk), ln pdrb (pertumbuhan ekonomi), miskin (persentase penduduk miskin) dan lnump (pertumbuhan UMP). Sedangkan untuk variabel idg (Indeks Pemberdayaan Gender) memiliki nilai probabilitas lebih dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan mengacu pada output regresi, penjelasan model yang diterapkan dalam penelitian ini dapat diinterpretasikan melalui formulasi berikut:

$$\text{gini} = 1,252347 - 0,0497865\text{lnpenduduk} + 0,0003934\text{idg} + 0,0512482\text{lnpdrb} + 0,0044008\text{miskin} - 0,0580646\text{lnump}$$

Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hipotesis pertama, yang menyatakan bahwa adanya dampak positif dan signifikan antara jumlah penduduk dengan ketimpangan pendapatan, tidak dapat diterima berdasarkan temuan penelitian. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien untuk variabel jumlah penduduk adalah -0,0497865. Artinya, setiap kenaikan sebesar 1% dalam jumlah penduduk di Pulau Sumatera akan mengakibatkan penurunan sebesar 0,0497865 poin pada *gini ratio*, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Selain itu, ketika melihat signifikansi variabel, jumlah penduduk secara signifikan memengaruhi ketimpangan pendapatan dengan nilai α sebesar 0,001. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk di Pulau Sumatera secara langsung berkontribusi pada pengurangan *gini ratio*. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016) dan Feraliani et al. (2021), yang menyimpulkan bahwa jumlah penduduk secara positif dan signifikan memengaruhi ketimpangan pendapatan.



Meski bertentangan, hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Putri (2023) dan *Raziq & El Hasanah (2023)*. Putri (2023) mengindikasikan bahwa jumlah penduduk memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung pada rentang waktu 2015-2021, sementara penelitian *Raziq & El Hasanah (2023)* menyatakan bahwa jumlah penduduk memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode tahun 2010-2020. Temuan ini mungkin dapat dijelaskan dengan asumsi bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat memberikan dampak positif terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan jika diiringi oleh peningkatan kualitas dan pemerataan penyebaran penduduk.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Variabel pertumbuhan ekonomi yang pada penelitian ini diukur dengan menggunakan pertumbuhan PDRB ADHK dan berdasarkan uji statistik t memiliki tingkat signifikansi 0,000 atau kurang dari α (0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera memiliki dampak yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil tersebut mengkonfirmasi keberhasilan penerimaan hipotesis kedua dalam penelitian ini. Koefisien yang tercatat sebesar 0,0512482 dapat diartikan sebagai indikasi bahwa setiap kenaikan sebesar 1% pada Produk Regional Bruto Daerah (PRDB) ADHK akan mengakibatkan peningkatan *gini ratio* sebanyak 0,0512482 poin. Kesimpulan ini sejalan dengan teori Kurva "U-Terbalik" Kuznets, yang menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin buruk pula ketimpangan pendapatan (*Todaro & Smith, 2020*).

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan hasil yang ditemukan dalam penelitian oleh Lestari (2016), Istiqamah et al. (2018), dan Caesarisma (2023). Menurut Lestari (2016), pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2008-2012. Penelitian yang melibatkan 34 provinsi di Indonesia oleh Istiqamah et al. (2018) juga menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif terhadap ketimpangan pendapatan di berbagai provinsi di Indonesia. Demikian pula, penelitian yang dilakukan oleh Caesarisma (2023) di Provinsi Jawa Barat menemukan hasil yang sejalan, yaitu adanya dampak positif pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hipotesis ketiga, yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IDG) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, tidak dapat diterima berdasarkan hasil penelitian. Analisis regresi menunjukkan bahwa koefisien untuk IDG adalah sebesar 0,0003934. Ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1 poin pada IDG hanya akan menyebabkan peningkatan sebesar 0,0003934 poin pada Gini Ratio, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Selanjutnya, ketika melihat signifikansi variabelnya, IDG tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai α sebesar 0,409 ($\alpha > 0,05$). Temuan ini menyiratkan bahwa peningkatan dalam Indeks Pembangunan Gender tidak secara langsung berkontribusi pada peningkatan *gini ratio*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam aspek ekonomi dan politik di Pulau Sumatera belum memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Temuan ini belum sejalan dengan pandangan *Todaro & Smith (2011)*, yang menekankan perlunya kebijakan dan komitmen bersama dari pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan peran mereka dalam proses pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Puspita Sari (2021) dan *Sari & Arif (2022)*. Puspita Sari (2021) menyatakan bahwa IDG tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan per kapita provinsi di Indonesia. Kemudian *Sari & Arif (2022)* juga menyatakan bahwa IDG tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan



ekonomi di wilayah kerassidenan Surakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa IDG di Pulau Sumatera belum terlalu berperan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menurunkan ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil pengujian statistik t pada variabel kemiskinan (persentase penduduk miskin) didapati tingkat signifikansi sebesar 0,001 ($\alpha < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel kemiskinan memiliki berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Koefisien yang dimiliki adalah sebesar 0,0044008 yang dapat diartikan bahwa kenaikan 1% penduduk miskin maka akan menaikkan *gini ratio* sebesar 0,0044008 poin. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat dapat diterima. Maka dari itu kemiskinan ini sangat erat kaitannya dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan hasil yang ditemukan dalam penelitian oleh Hindun et al. (2019), Rini et al. (2022), dan Kunenengan et al. (2023). Hindun et al. (2019) menyatakan dalam penelitiannya bahwa variabel kemiskinan memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian Rini et al. (2022), yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin memberikan dampak positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian oleh Kunenengan et al. (2023) yang fokus pada Provinsi Sulawesi Utara juga menemukan bahwa variabel kemiskinan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil pengujian statistik t pada variabel UMP didapati tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($\alpha < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel UMP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai koefisien variabel UMP adalah sebesar -0,0580646 yang dapat diartikan bahwa kenaikan 1% UMP maka akan menyebabkan penurunan pada *gini ratio* sebesar 0,0580646 poin. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima berhasil diterima.

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan hasil yang ditemukan dalam penelitian oleh Anshari et al. (2019), Noviana (2020), dan Bhagaskara (2023). Menurut Anshari et al. (2019), upah minimum provinsi memberikan dampak yang signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, dan berperan penting dalam upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Temuan serupa juga disorot dalam penelitian Noviana (2020), yang menunjukkan bahwa upah minimum provinsi memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian Bhagaskara (2023) juga menitikberatkan pada pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan, dan menemukan bahwa upah minimum dapat mengurangi disparitas pendapatan karena upah memengaruhi kesejahteraan pekerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas mereka.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa indeks pemberdayaan gender tidak memengaruhi ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Artinya, meskipun perempuan telah berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan politik, dampaknya terhadap penurunan ketimpangan pendapatan masih terbatas. Sebaliknya, variabel PDRB dan tingkat kemiskinan menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Temuan ini sejalan dengan konsep Kurva "U-Terbalik" Kuznets, di mana pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan cenderung meningkat, kemudian mengalami perbaikan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang dapat mengurangi jumlah penduduk miskin untuk mengatasi disparitas pendapatan. Upah Minimum Provinsi (UMP) memberikan dampak negatif



dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, menunjukkan bahwa kebijakan UMP yang tepat dapat menjadi alat efektif dalam mengurangi ketidaksetaraan pendapatan di Pulau Sumatera. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera, asalkan pertumbuhan ini disertai dengan peningkatan kualitas dan pemerataan distribusi penduduk. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan mencakup langkah-langkah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, implementasi kebijakan UMP yang tepat, dan upaya untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pertumbuhan penduduk di Pulau Sumatera.

Saran

Rekomendasi untuk pemerintah, terutama yang berada di Pulau Sumatera, adalah fokus dalam merancang kebijakan yang dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan cermat dan meningkatkan kualitas serta pemerataan pertumbuhan penduduk untuk menanggulangi ketimpangan pendapatan. Studi ini memiliki keterbatasan karena belum menyelidiki variabel yang berkaitan dengan kualitas masyarakat, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, saran untuk penelitian berikutnya adalah melibatkan variabel IPM dalam analisis dan memperdalam variabel pertumbuhan penduduk, mengingat perbedaan baik dari segi teori maupun hasil penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Graha Ilmu.
- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni, A. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 494. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.4990>
- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan (Edisi Kelima)*. UPP STIM YKPN.
- Awaludin, M., Maryam, S., & Firmansyah, M. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Kecil Dan Menengah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. In *Jurnal Konstanta Ekonomi Pembangunan (Vol. 2)*.
- BAPPENAS. (2021). *Buku Saku Pemandangan Ibu Kota Negara*.
- Bhagaskara, A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur Pada Tahun 2011-2019. *JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES*, 2, 827–843.
- Caesarisma, E. (2023). Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2017-2021. *Jurnal Ekonomika Dan Dinamika Sosial*, 81–98.
- Feraliani, Valeriani, D., & Yusnita, M. (2021). Analisis Disparitas Pendapatan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Equity : Jurnal Ekonomi*.
- Hartono, D., Tampubolon, E. G., & Irvan, Moh. (2023). Pengaruh Pembangunan Dan Pemberdayaan Gender Serta Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2020. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 9(4), 373–382.
- Hindun, H., Soejoto, A., & Hariyati, H. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(3), 250. <https://doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721>
- Istiqamah, I., Syaparuddin, S., & Rahmadi, S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (studi provinsi-provinsi di Indonesia). *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 111–126. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i3.6903>



- Kunenengan, R. M. A., Engka, D. S. M., & Rorong, I. P. F. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Lima Kabupaten/Kota Di Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(3).
- Lestari, S. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*.
- Mankiw, N. G. (2016). *Macroeconomics (Ninth Edition)*. Worth Publisher.
- Noviana, S. N. (2020). Pengaruh Upah Minimum Regional Dan Rasio Infrastruktur Terhadap kesenjangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. In *Jurnal Akuntansi AKTIVA* (Vol. 116, Issue 2).
- Nuriani, D. (2019). Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017. Universitas Negeri Semarang.
- Puspita Sari, C. (2021). Gender Inequality: Dampaknya terhadap Pendapatan Per Kapita (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia 2011-2019). *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 1(1), 47–52. <https://doi.org/10.11594/jesi.01.01.06>
- Putri, D. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kesenjangan Pendapatan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2015-2021. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Raziq, K., & El Hasanah, L. L. N. (2023). Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 12–21. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss1.art2>
- Rini, G. A. M. C., Suciptawati, N. L. P., & Utari, I. A. P. A. (2022). Identifikasi Faktor Yang Memengaruhi Gini Ratio Di Indonesia. *E-Jurnal Matematika*, 11(3), 160. <https://doi.org/10.24843/MTK.2022.v11.i03.p376>
- Sari, R. M., & Arif, M. (2022). Women's Emancipation in Their Contribution to Economic Development in the Surakarta Residency Region 2016-2020.
- Sekar Palupi, P. G., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Pengaruh Pajak Karbon, Penggunaan Bahan Bakar Fosil, Dan Pertumbuhan PDB Terhadap Emisi Karbon. *Jurnalku*, 3(2), 119–127. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i2.385>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016). Koefisien Gini Membaik, Terjadi Penurunan Ketimpangan Pengeluaran di Masyarakat. <https://Setkab.Go.Id/Gini-Ratio-Membaik-Terjadi-Penurunan-Ketimpangan-Pengeluaran-Di-Masyarakat/>.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Sungkar, S. N., Nazamuddin, & Muhammad Nasir. (2015). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2).
- Syahri, D., & Gustiara, Y. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara Periode 2015-2019. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 34–43.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesebelas)*. Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development (Thirteenth Edition)*. Pearson Education Limited.
- World Bank. (2022). Gini Index – Indonesia. <https://Data.Worldbank.Org/Indicator/SI.POV.GINI?Locations=ID>.